

**IMPLEMENTASI KEBLIJAKAN PENGELOMPOKAN
DAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA
DI KABUPATEN SAMOSIR**

SKRIPSI

OLEH:

TIUR DAME R SAGALA
198510030



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Document Accepted 4/12/23

Access From (repository.uma.ac.id)4/12/23

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA Tiur Dame R Sagala
NPM 198510030
JUDUL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOMPOKAN
DAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI
KABUPATEN SAMOSIR

Disetujui oleh,

Pembimbing I	Pembimbing II
	
<u>DR. NOVITA WULANDARI, S.T., M.I.P</u>	<u>WALID MUSTHAFA SEMBIRING, M.I.P</u>
Tanggal _____	Tanggal _____

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik	Ketua Program Studi,
---	----------------------


Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si
Tanggal _____


Dr. Novita Wulandari, S.ST., M.Si
Tanggal _____

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumber nya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Juli 2023

Tiur Dame R Sagala

198510030

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/ SKRIPSI/ TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

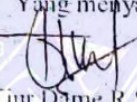
Nama : Tiur Dame R Sagala
NPM : 198510030
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non – exclusive Royalty – Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul: Implentasi Kebijakan Pengelompokan Dan Pengembangan Objek Wisata Di Kabupaten Samosir.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/ format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/ skripsi/ tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai Pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Juli 2023
Yang menyatakan


Tiur Dame R Sagala

198510030



ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOMPOKAN DAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN SAMOSIR

Pariwisata merupakan salah satu industri yang sangat penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, pariwisata merupakan sumber penerimaan devisa tertinggi setelah minyak dan gas. Melalui Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemerintah menyusun rencana strategis program pengembangan destinasi pariwisata. UU yang mengatur pengelolaan pariwisata diawali Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang mengatur pengelolaan pariwisata bertujuan meningkatkan kesejahteraan perekonomian. faktor pendukung pengembangan pariwisata Kabupaten Samosir potensi alam dan keunikan budaya tradisional, faktor penghambatnya kepemilikan lahan, kesadaran masyarakat terhadap pariwisata yang rendah dan minimnya anggaran pembangunan.

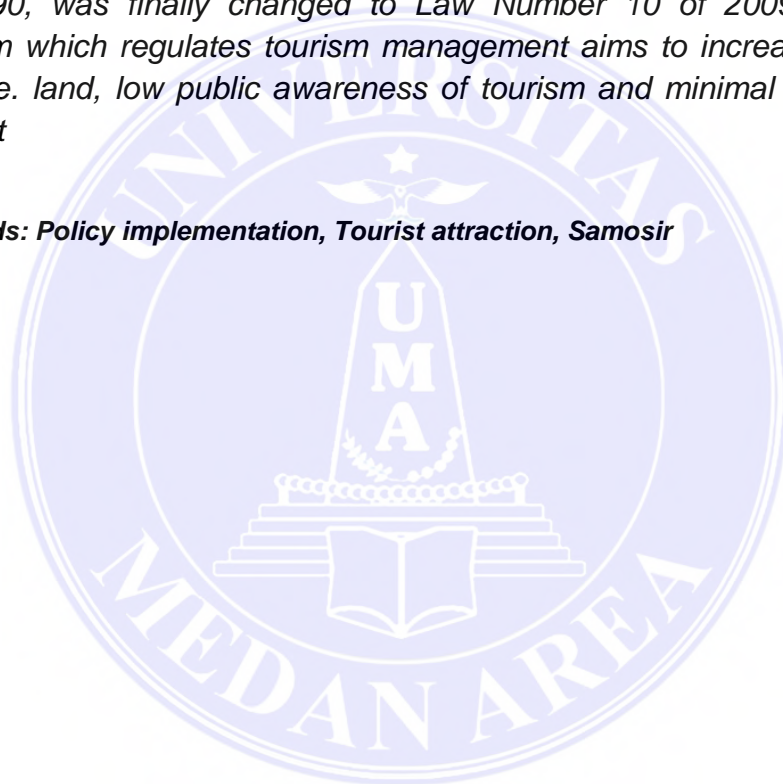
Kata kunci ; *Implementasi kebijakan, Objek wisata, Samosir*

ABSTRACT

POLICY IMPLEMENTATION OF CLASSIFICATION AND DEVELOPMENT OF TOURISM OBJECTS IN SAMOSIR REGENCY

Tourism is one of the most important industries in advancing people's welfare, tourism is the highest source of foreign exchange earnings after oil and gas. Through the Department of Culture and Tourism, the Government has prepared a strategic plan for the development of tourism destinations. The law that regulates tourism management, starting with Law Number 9 of 1990, was finally changed to Law Number 10 of 2009 concerning tourism which regulates tourism management aims to increase economic welfare. land, low public awareness of tourism and minimal development budget

Keywords: *Policy implementation, Tourist attraction, Samosir*



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Tiur Dame R Sagala, anak dari Bapak Kamin Korban Sagala dan Ibu Naema Manalu. Penulis lahir di Harianboho 07 September 1999 di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Penulis merupakan anak ke-5 dari 7 bersaudara. Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar SD N 2 Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir dan lulus tahun 2012. Kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Harian dan lulus pada Tahun 2015 melanjutkan Pendidikan di SMK N 2 Balige, Kabupaten Toba Samosir lulus tahun 2018. Setelah itu pada tahun 2019 Penulis melanjutkan Pendidikan Kuliah di Universitas Medan Area.

Penulis juga bergabung dalam organisasi eksternal kampus yaitu Pemuda Katolik Republik Indonesia dan bergabung di Organisasi Internal yaitu IKAMITA (Ikatan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan) Sebagai Ketua Bidang Media Massa.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, kesehatan, dan kasih karunia-Nya yang selalu berlimpah setiap waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan setiap tahapan dari penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengelompokan Dan Pengembangan Objek Wisata Di Kabupaten Samosir”** yang disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi sarjana (S-1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Di Universitas Medan Area.

Banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi dalam penyusunan ini namun berkat kehendak-Nyalah penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area
3. Ibu Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si. selaku ketua program studi Ilmu Pemerintahan juga selaku dosen pembimbing akademik dan pembimbing-1 skripsi saya yang sudah banyak berperan penting dan meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan proposal skripsi
4. Ibu Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si. selaku dosen pembimbing-I yang sudah berkenan meluangkan waktunya demi memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi.
5. Bapak Walid Musthafa Sembiring, M.IP selaku dosen pembimbing-II yang sudah berkenan meluangkan waktunya demi memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi.
6. Bapak Hikmawan Syahutra, S.IP, MA selaku sekretaris, yang telah memberikan saran dan tanggapan dalam Peneulisan skripsi ini
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area yang sudah berkenan memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.

8. Segenap Tenaga pendidik Universitas Medan Area yang berkenan memberikan bantuan kepada penulis.
9. Orangtua ku tercinta Bapak Kamin Korban Sagala dan ibu Naema Manalu yang telah berjuang dan memberikan doa serta berperan penuh dalam perjalanan hidup penulis
10. Kakak saya Theresya Tiarlidora Sagala, Hariancari Sagala, Rointan Sagala, Dan Adik ku Tercinta Ricci Sagala, Satria Katarina Sagala Terimakasih banyak atas dukungan, doa, motivasi dari awal pendidikan saya sampai dengan akhirnya saya mendapatkan gelar sarjana.
11. Juga kepada Sepupu saya Novita Martina Sagala yang sudah meluangkan waktu kepada penulis selama melakukan penelitian.
12. Teman kos saya Lifa Situmorang, dan Siti nurica Tumangger yang membantu dalam penulisan skripsi saya dan menjadi bagian dari pajuang sarjana Ilmu Pemerintahan
13. Seluruh teman Priodi Ilmu Pemerintahan stambuk-19
14. Orang-orang terkasih yang tidak bisa Saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, Desember 2022

Hormat Saya,

Tiur Dame R. Sagala

DAFTAR ISI

ABSTRAK

ABSTRACT	vi
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8

2.1 Implementasi Kebijakan	8
a. Definisi Implementasi Kebijakan	12
2.2 Pemerintah Daerah.....	13
a. Kebijakan Publik.....	14
2.3 Kepariwisataaan	17
2.4 Kerangka Pemikiran	19
2.5 Penelitian Terdahulu	22

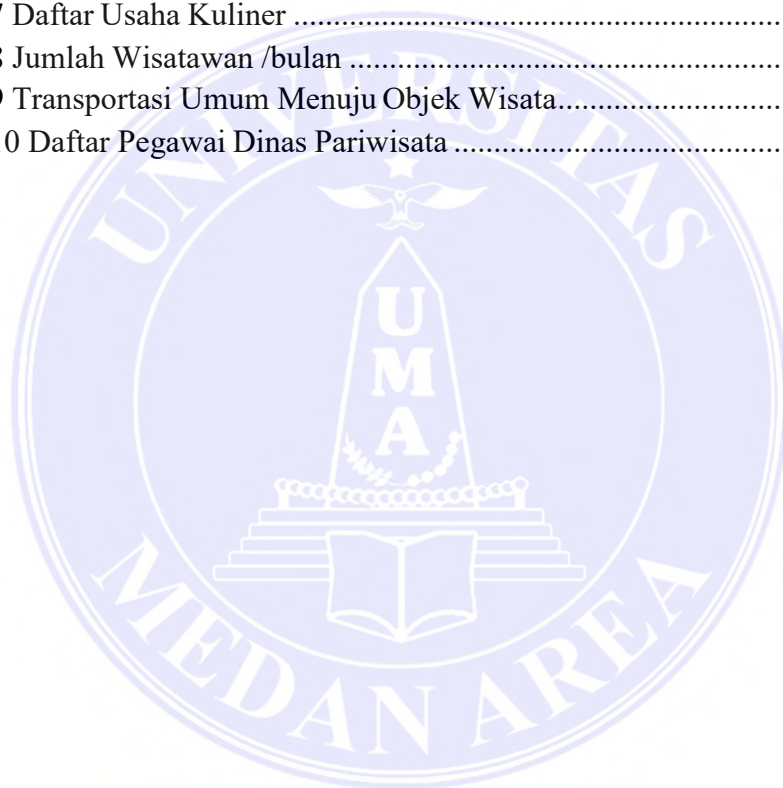
BAB 3 METODE PENELITIAN 30

3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	31
3.3 Informan	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data	32
3.5 Teknik Analisa Data	34

3.6 Keabsahan Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	40
4.1.1 Visi Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir	50
4.1.2 Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Samosir.....	51
4.2 HASIL PENELITIAN	52
4.3 Implementasi Kebijakan Pengelompokan Dan Pengembangan Objek Wisata Di Kabupaten Samosir.....	75
4.3.1 Indikator Komunikasi (communication)	75
4.3.2 Indikator Sumber Daya (resources).....	77
4.3.3 Indikator Disposisi (Dispositions Atau Attitudes)	79
4.3.4 Indikator Struktur Birokrasi (Bureucirati Structure).....	80
4.4 Faktor Yang Memengaruhi Pengelompokan Dan Pengembangan Objek Wisata Di Kabupaten Samosir.....	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	83
5.1 Kesimpulan	83
5.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN PEDOMAN OBSERVASI	89
LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA	90
LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP SINGKAT	109

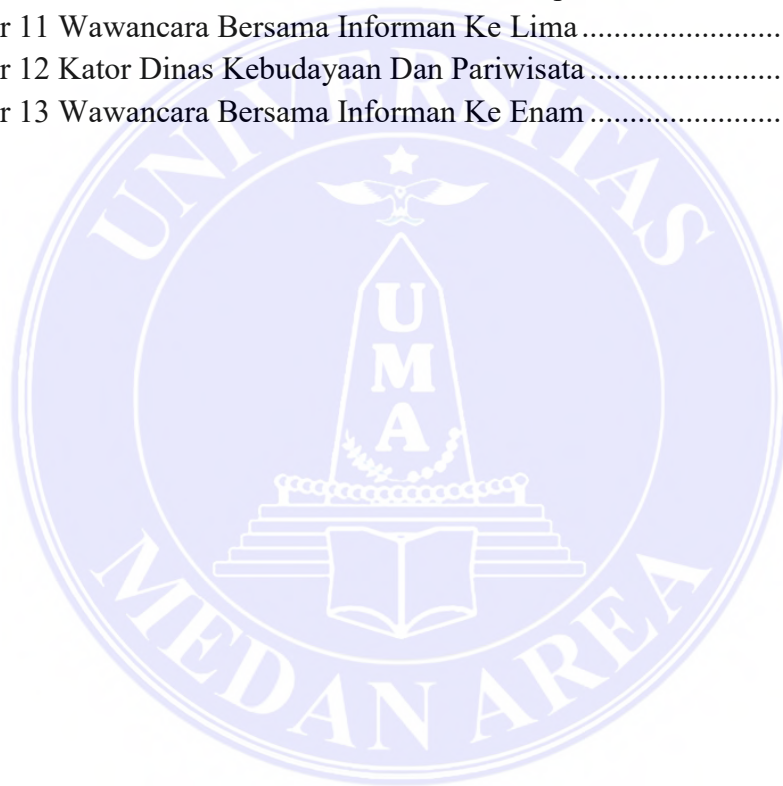
DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Objek Wisata Di Kabupaten Samosir	4
Tabel 2 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3 Informan Penelitian.....	34
Tabel 4 Penyelesaian Skripsi.....	39
Tabel 5 Luas wilayah Kabupaten Samosir Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020	48
Tabel 6 Daftar Klasifikasi Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata (RIPO) Di Kabupaten Samosir.....	70
Tabel 7 Daftar Usaha Kuliner	72
Tabel 8 Jumlah Wisatawan /bulan	72
Tabel 9 Transportasi Umum Menuju Objek Wisata.....	73
Tabel 10 Daftar Pegawai Dinas Pariwisata	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Kerangka Berpikir	21
Gambar 2 Peta Kabupaten Samosir.....	40
Gambar 3 Peta Orientasi Kabupaten Samosir	49
Gambar 4 Peta Pariwisata Kabupaten Samosir	50
Gambar 5 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata.....	51
Gambar 6 Wawancara Bersama Informan Pertama	65
Gambar 7 Wawancara Bersama Informan Ke Dua.....	65
Gambar 8 Kantor Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	66
Gambar 9 Wawancara Bersama Informan Ke Tiga	66
Gambar 10 Wawancara Bersama Informan Ke Empat	67
Gambar 11 Wawancara Bersama Informan Ke Lima	68
Gambar 12 Kantor Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	68
Gambar 13 Wawancara Bersama Informan Ke Enam	69



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu industri yang sangat penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, pengembangan pariwisata merupakan sumber penerimaan devisa tertinggi setelah minyak dan gas, oleh karena itu pariwisata merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi perekonomian Indonesia. Perkembangan pariwisata tentunya sangat mempengaruhi pendapatan masyarakat dengan memberikan nilai tambah melalui sumber daya manusia (SDM) serta produk dan jasa yang merupakan penunjang membantu kesejahteraan masyarakat. Karakter sektor ini memang inklusif, karena dampak ekonominya dapat langsung dirasakan melalui transaksi ekonomi yang terjadi (Pitana, 2005: 05). Industri pariwisata saat ini diharapkan mampu memberikan pengaruh besar yang dapat membangun perekonomian rakyat maupun pendapatan daerah melalui retribusi industri pariwisata. Salah satu objek wisata alam dan kebudayaan yang ditargetkan pemerintah untuk dijadikan “Bali Kedua” yaitu Danau Toba. Daerah ini merupakan salah satu tujuan utama pemerintah yang ditargetkan sebagai destinasi wisata yang setara dengan Bali, alasan pemerintah menjadikan Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata yang setara dengan Bali karena memiliki daya tarik tersendiri untuk dikembangkan sesuai dengan penerapan kebijakan yang memiliki citra kearifan lokal (Fransiska, 2013 : 3).

Salah satu daerah yang memiliki potensi keindahan alam, dan budaya atau adat istiadat yang memiliki daya tarik dan mampu memberikan nilai jual yang sangat tinggi kepada banyak orang adalah daerah Danau Toba yang ada di Kabupaten Samosir. Untuk mengoptimalkan potensi pariwisata Melalui Dinas pariwisata seni dan budaya menyusun suatu rencana strategis yaitu program pengembangan destinasi pariwisata, program pengembangan kemitraan dan program pengembangan pemasaran pariwisata (Ridwan 2021: 18). Usaha pengembangan pariwisata di Indonesia juga terus diperbaiki, terbukti bahwa selalu lahir undang-undang yang mengatur masalah pembangunan, pemasaran pariwisata, sampai pada usaha menjaga kelestarian objek pariwisata itu sendiri. UU yang mengatur pengelolaan pariwisata diawali Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 dan terakhir kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang mengatur pengelolaan pariwisata dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat karena dapat menunjang peningkatan kualitas pariwisata di Danau Toba. Regulasi dan kebijakan pemerintah yang menunjukkan kepedulian terhadap kearifan lokal Daerah Kabupaten Samosir juga dapat menjadi penopang dan penunjuk arah bagi masyarakat sehingga pada akhirnya hasil riset dapat meningkatkan kualitas pariwisata di kawasan ini (Eric 2020 :230).

Kecenderungan kontribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan setiap tahunnya dan berdasarkan urutannya, pada tahun 2014 sektor pariwisata hanya menduduki urutan 15 pada daftar penghasil pendapatan asli

daerah Kabupaten Samosir. Hasil penelitian di atas dapat disebabkan faktor pendukung yaitu potensi pariwisata yang dimiliki, kebijakan kepala daerah berbasis kepariwisataan dan sumber daya anggaran yang mencukupi. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain adanya permasalahan pada kepemilikan lahan di objek wisata, kesadaran masyarakat terhadap pariwisata yang tergolong rendah dan jaringan jalan dan infrastruktur lingkaran Samosir dan objek wisata yang mengalami kerusakan (Wahyono 2016)

Tabel 1
Jumlah Wisata di Kabupaten Samosir Tahun 2022

No	Objek Wisata Di Kabupaten Samosir	Jumlah
1	Kecamatan Pangururan	9
2	Kecamatansimanindo	23
3	Kecamatan Sianjur Mula-Mula.	15
4	Kecamatan Ronggur Nihuta	8
5	Kecamatan Harian	13
6	Kecamatan Sitio-Tio	4
7	Kecamatan Palipi	5
8	Kecamatan Nainggolan	9
9	Kecamatan Onanrunggu	5
TOTAL		91

Sumber : Potensi Unggulan Kabupaten Samosir/Pariwisata 2022

Berdasarkan tabel diatas diuraikan jumlah objek wisata yang terdapat di Kabupaten Samosir, Pemerintah Kabupaten Samosir berencana mengembangkan objek-objek wisata yang wajib dimanfaatkan agar semakin mengundang wisatawan. RIPPARNAS (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional) berencana menjadikan Danau Toba sebagai wisata internasional atau sebagai Monako Asia. Dengan cara ini Kawasan pariwisata ini akan membantu masyarakat setempat berkembang sehingga mampu menjadi penggerak utama pariwisata, dan

mewujudkan potensinya sebagai kawasan Pariwisata yang unggul dan berdaya saing. pengelolaan objek wisata berdasarkan wilayah di Kabupaten Samosir merupakan salah satu kebijakan yang harus dilaksanakan agar tujuan pengembangan pariwisata di kawasan Danau Toba dapat terwujud dengan baik dan optimal. Kebijakan pariwisata dimaksud berupa surat keputusan dari Bupati Kabupaten Samosir yang menjelaskan tentang pengelolaan objek wisata di Kabupaten Samosir menurut kriteria yang telah ditetapkan, Penetapan kriteria dan klasifikasi objek wisata di Kabupaten Samosir, berdasarkan bagian pertama Keputusan Bupati Samosir Nomor 474 Tahun 2017 yaitu 1) Ruang Fisik; 2) Jumlah dan Jenis Daya Tarik; 3) Jumlah dan Jenis Fasilitas Wisata; 4) Jumlah dan Jenis Fasilitas Umum; 5) Aksesibilitas; 6) Kesiapan Masyarakat; 7) Jumlah Wisatawan. Di Bagian Kedua, terdapat 3 klasifikasi pengelompokan objek wisata, yaitu 1) Objek Wisata Unggulan; 2) Objek Wisata Prioritas; 3) Objek Wisata Rintisan. Pengelompokan objek wisata ini dimaksudkan untuk memudahkan pengembangan pariwisata di Kabupaten Samosir, namun sumber daya manusia yang tersedia tidak mencukupi untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Kebijakan ini dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam mengelola objek wisata dengan baik dan lebih kompetitif dengan destinasi wisata lainnya. Pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Samosir belum efektif dari segi prosedur dan pengelolaan. Masyarakat masih belum bisa mengelola objek wisata yang telah diatur dalam kebijakan pariwisata Kabupaten Samosir seperti percontohan, unggulan dan prioritas. Pariwisata dapat mendukung pembangunan di suatu daerah dengan

memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hal pekerjaan, pendapatan, dan bentuk pembangunan lainnya. Hal yang dilakukan untuk pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Samosir adalah melalui wisata budaya, pengembangan wisata alam, maupun wisata event (*event tourism*). Pengembangan pariwisata dilakukan berdasarkan potensi wisata di wilayah Kabupaten Samosir Sektor pariwisata ini dipilih karena merepresentasikan potensi yang sangat tinggi karena kondisi letak Kabupaten Samosir Berada Di Sekitaran Danau Toba dengan jejeran bukit, dimana alamnya tergolong masih arsi dan udaranya begitu sejuk. Hal itu selama ini kerap menjadi daya tarik untuk menjadikan Kabupaten Samosir menjadi salah satu sector pariwisata yang dapat mendukung perbaikan perekonomian masyarakat daerah Kabupaten Samosir. (saputra, 2020: 565)

Ketersediaan sumber daya manusia sangat penting agar kebijakan kepariwisataan dapat dilaksanakan dengan cepat sehingga percepatan pembangunan sektor pariwisata dapat dilakukan melalui pengelompokan objek wisata yang benar dan sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Sehingga diharapkan implementasi kebijakan pengelompokan sektor pariwisata ini dapat mengoptimalkan pengembangan pariwisata di Kabupaten Samosir sesuai dengan pencapaian tujuan yang diharapkan.

Kementerian Pariwisata RI no 14 tahun 2016 Pariwisata dapat dilakukan dengan bantuan pendekatan pendidikan dan pelatihan formal. Pejabat pemerintah, pengusaha di bidang industri pariwisata, pegawai di industri pariwisata, dan masyarakat, semuanya dididik dalam pendidikan dan/atau pelatihan formal guna

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Yoeti (2016;243) berpendapat bahwa daya tarik objek wisata didasarkan pada adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, keindahan, kenyamanan, dan kebersihan, serta aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya. Selain itu, keistimewaan atau spesifikasi objek mungkin juga langkah, dan infrastruktur pendukungnya mungkin tersedia untuk melayani wisatawan yang hadir.

1.2 Identifikasi Masalah

- 1.2.1 Kurangnya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dalam pembangunan kawasan wisata di Kabupaten Samosir
- 1.2.2 Keperdulian masyarakat setempat dalam pembangunan objek wisata masih kurang.

1.3 Rumusan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup yang akan diteliti, maka masalah yang akan diambil dalam penelitian ini adalah

- 1.3.1 Bagaimana Implementasi Kebijakan pengelompokan dan pengembangan objek di Kabupaten Samosir?
- 1.3.2 Apa faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Kabupaten Samosir Dalam pengelompokan dan Pengembangan sektor Pariwisata di Kabupaten Samosir ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian adalah:

1.4.1 Untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan sektor Pariwisata di Kabupaten Samosir.

1.4.2 Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Samosir

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi gambaran yang jelas dalam mengimplementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Samosir dalam pembangunan sektor pariwisata.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini menjadi pedoman bagi pemerintah Kabupaten Samosir dalam meningkatkan pengembangan sektor pariwisata dan perekonomian daerah setempat. Serta diharapkan mampu memperluas dan menambah wawasan dibidang Studi Implementasi Kebijakan dalam program pendidikan ilmu pemerintahan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi Kebijakan

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Suharsono (2008 : 187) Implementasi kebijakan publik merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Menurut Anderson dalam (Karmanis & karjono 2020:6) pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Implementasi kebijakan pada dasarnya yaitu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, terdapat dua pilihan langkah, yaitu mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan.

Menurut grindle (Karmanis & Karjono 2020:5) bahwasanya implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat di teliti pada tingkat program tertentu. Menurut (Karmanis & Karjono 2020:6) Implementasi kebijakan pada intinya adalah suatu cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Suatu kebijakan atau program harus di implementasikan agar mempunyai

dampak atau tujuan yang diinginkan.

Menurut George Edward III (Winarno, 2012;2017) Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Edward III (Winarno, 2012;2017) melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu Edward III (Winarno, 2012;2017) menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus di ajukan 2 pertanyaan:

- a. Apakah menjadi persyaratan bagi implementasi kebijakan?
- b. Apakah yang menjadi factor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Edward mengusulkan empat faktor yang memainkan peran penting dalam mencapai keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi kebijakan adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Adapun model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George Edward III. Menurut George Edward III (Winarno, 2012:177) mengemukakan bahwa dalam implementasi kebijakan diperlukan variable-variabel pelaksanaan

yaitu faktor- faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi (*communication*), Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus dapat dikomunikasikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Di mana agar komunikasi menjadi efektif maka para pelaksana kebijakan harus mengerti apa yang harus mereka kerjakan dan menyalurkan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan pada orang yang tepat sehingga komunikasi menjadi akurat.

b. Sumber Daya

Sumber Daya (*Resources*) Sumber Daya tersebut berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya ini merupakan faktor yang sangat penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Karena walaupun kebijakan sudah dapat di komunikasikan dengan baik, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak dapat berjalan secara efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di atas kertas saja, dan tidak ada yang mengimplementasikannya.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap-sikap (*Dispositions*) Implementor yang memiliki disposisi yang baik adalah implementor yang dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Dan apabila yang terjadi adalah yang sebaliknya yaitu ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses

implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Disposisi (sikap) yang menghambat implementasi antara lain: Pertama Pejabat yang bertanggung jawab tidak tertarik untuk menerapkan hukum yang seharusnya berlaku. Kedua terkadang para pelaksana bersikap selektif terhadap instruksi yang mereka terima dan kadang-kadang menolak instruksi yang tidak sama dengan sikap atau pandangan mereka akan kebaikan tertentu. Ketiga perbedaan pandangan organisasi juga merintangai kerjasama diantara badan-badan/organisasi yang seharusnya bekerjasama melaksanakan kebijakan. Keempat unit-unit birokrasi biasanya menekankan program-program baru yang mereka anggap akan memperkuat atau mengembangkan aspek-aspek penting misi kebijakan mereka. Kelima unit-unit birokrasi yang menentang usaha-usaha pihak lain yang mengambil atau bersama-sama memakai sumber-sumber (resources) yang penting untuk melaksanakan tugasnya. Keenam sikap pejabat yang seharusnya mendapat keuntungan dari implementasi suatu kebijakan yang menghalangi mereka untuk memperoleh keuntungan tersebut.

d. Struktur Birokrasi

Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Tugas Implementasi Kebijakan adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik dapat diwujudkan melalui kegiatan

instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

a. Definisi Implementasi Kebijakan

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015 : 45) ; “ *those activities directed toward putting a program into effect*” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya) sedangkan menurut Horn dan Meter “*Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy*” (Upaya Pemerintah). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Kebijakan Pemerintah dilaksanakan melalui struktur birokrasi. Meskipun sumber daya tersedia, atau pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus mereka lakukan, dan memiliki keinginan untuk melakukan suatu kebijakan, ada kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau diwujudkan karena kelemahan struktur birokrasi. Ketika sebuah kebijakan rumit, itu membutuhkan kerja sama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap sumber daya yang tersedia, maka dapat menyebabkan implementasi kebijakan tidak efektif atau berpotensi menghambat implementasi kebijakan

Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (Dalam Solichin (2008:71). Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/ instansi pelaksana tidak akan

menimbulkan gangguan atau kendala yang serius



2. Tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
3. Perpaduan sumber-sumber yang di perlukan benar-benar tersedia
4. Kebijakan yang akan di implementasikan didasari pada hubungan kausalitas yang handal
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
8. Tugas-tugas di perinci dan di tempatkan dalam urutan yang tepat
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang/ kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Model di atas harus diperhatikan dengan seksama agar implementasi kebijakan dapat terealisasi dengan baik dan tepat. Keberagaman sumber daya yang dimaksud adalah waktu, materi, dan sumber daya manusia, harus tersedia serta memadai juga harus terkombinasi dengan seimbang.

2.2 Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemerintah daerah yang

menyelenggarakan pemerintahan daerah kabupaten/ kota terdiri dari kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang disahkan pada tahun 2004 memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengurus berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pemerintah daerah harus memperhatikan preferensi masyarakat untuk mengoptimalkan pembangunan daerah. Camat bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah kota. Tanggung jawab Camat kepada sekretaris daerah merupakan tanggung jawab administratif. Implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Samosir dalam program pengelompokan sektor pariwisata ditentukan oleh bagaimana penerimaan masyarakat yang ditunjukkan dengan sikap tanggap terhadap kebijakan tersebut.

a. Kebijakan Publik

Menurut Muladi (2015:12), Implementasi mengarah pada tindakan yang mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola operasional serta berusaha mencapai perubahan besar atau kecil bagaimana telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan, dalam tataran praktis implementasi adalah proses pengambilan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

- a) Tahapan pengesahan peraturan perundangan
- b) Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksanaan

- c) Kesiediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan
 - d) Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak
 - e) Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana
 - f) Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan
- Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal

penting di antaranya:

- 1) Penyiapan sumber daya unit dan metode.
- 2) Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan
- 3) Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn dalam Budi Winarno (2007:33-24) adalah:

1. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan. kemudian masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan permasalahan tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, consensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

5. Tahapan Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Tahap implementasi menjadi begitu penting karena kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dilaksanakan dengan baik dan benar.

Perumusan kebijakan publik merupakan saat yang paling tepat bagi anggota masyarakat untuk berpartisipasi mengajukan usulannya. Meskipun demikian, tidak semua anggota masyarakat mau memanfaatkan kesempatan itu bebrapa alasan berasal dari dalam diri anggota masyarakat, hal-hal yang menyebabkannya adalah:

- a Masyarakat terbiasa pada pola lama yaitu pembuatan paraturan tanpa partisipasi warga telah terbiasa patuh pada perintah dari pusat tanpa mempertanyakan aturan tersebut. maka, ketika kesempatan berperpartisipasi

dibuka, maka suli bagi merekan mengubah pola pikir yang telah ada.

- b. Masyarakat tidak tau adanya kesempatan untuk berpartisipasi karena masyarakat yang tinggal di pedalaman atau jauh dari jangkauan media, sangat sulit untuk mendapatkan informasi. Meraka hanya mengandalkan informasi dari mulut ke mulut atau informasi dari pimpinan. Padahal pemimpinnya belum tentu mengetahui adanya kesempatan ini. Akibatnya, perumusan kebijakan publik sulit untuk mendapatkan partisipasi dari masyarakat
- c. Masyarakat tidak mengetahui prosedur dalam berpartisipasi, karena dalam berpartisipasi diperlukan langkah-langkah yang baik dan benar. Contoh penyampain informasi kepada Wakil Rakyat, akan tetapi, seringkali pengetahuan mengenai prosedur ini tidak tersosialisaikan dengan baik. Mereka tidak mengetahui cara menyalurkan pendapatnya masyarakat jadi enggan untuk berpartisipasi.
- d. Masyarakat tidak mau mengetahui, tidak semua anggota masyarakat memberikan perhatian pada apa yang terjadi di dalam lingkungannya. Setiap orang memilikikepentingan sendiri-sendiri. Maka kemungkinan kebijakan publik tersebut tidak ada manfaatnya untuk ikut berpartisipasi.

2.3 Kepariwisataan

Kata pariwisata merujuk pada kata *tourisim* yang bersal dari bahasa latin *tornare* dan *yunani tornos* yang berarti memutar pergerakan mengitari titik pusat. sedangkan kata *tourism* sendiri yang merupakan bahasa *Inggris* modern memiliki arti suatu proses perilaku orang yang melakukan perjalanan dari satu titik ke titik lainnya dan kembali ke titik semula (Theobald, 1998:15). Orang yang melakukan

disebut tourist atau wisatawan.

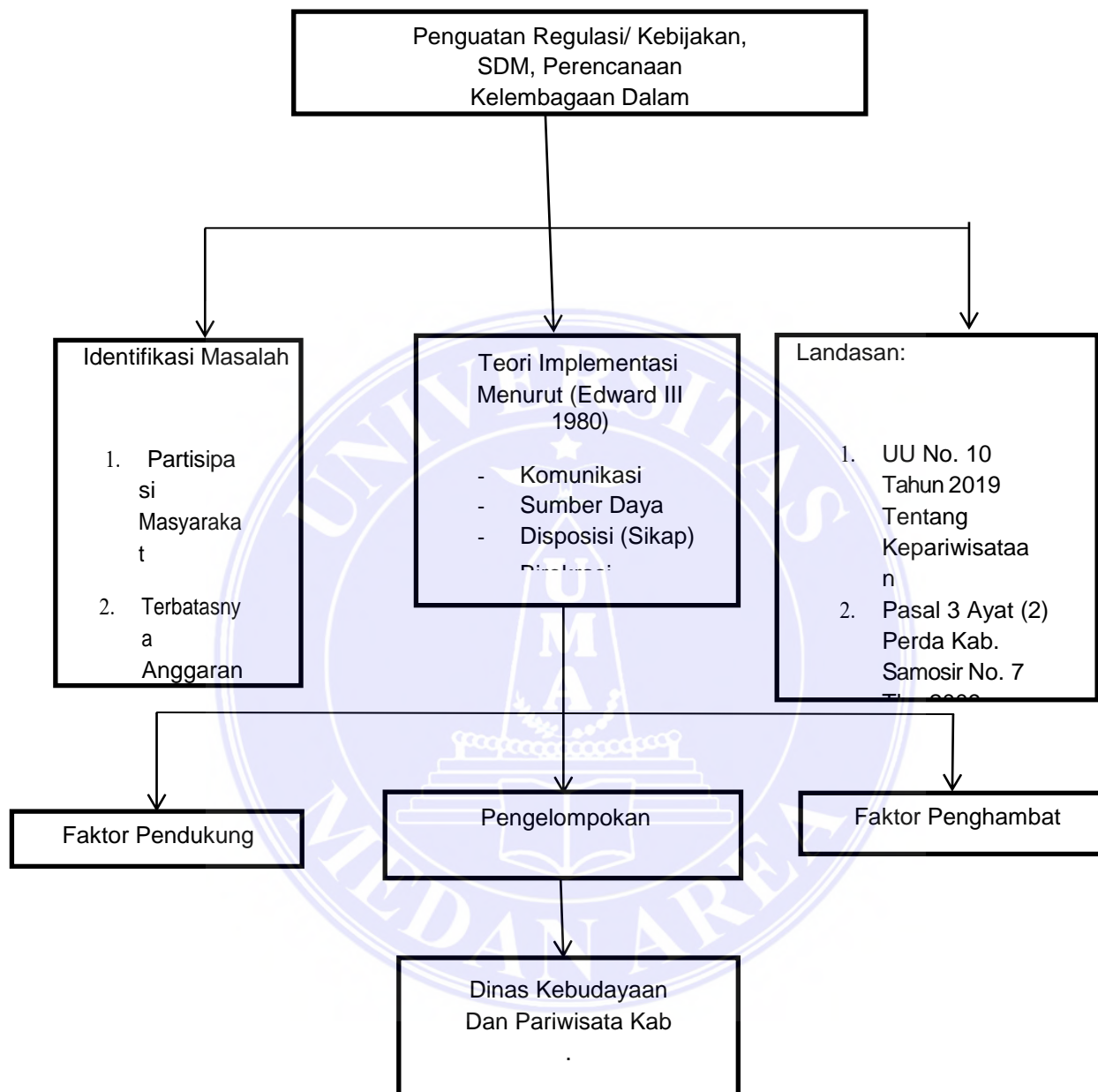
Definisi pariwisata, seiring dengan perkembangan zaman, mengalami perubahan untuk mengungkap sifat penting dari pergerakan wisatawan (baik domestik maupun internasional). Tujuannya adalah agar dapat digunakan sebagai batasan atau acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya yang terkait dengan dunia pariwisata.

Dengan adanya definisi, baik yang dibuat oleh lembaga resmi (*world tourism organization*) ataupun seorang ahli atau pakar pariwisata, maka secara operasional definisi tersebut dapat di gunakan untuk kepentingan pendataan statistik pariwisata di suatu negara karena berdasarkan definisi kita dapat membedakan mana wisatawan dan mana yang bukan wisatawan. Yang tidak termasuk dalam kategori wisatawan, berdasarkan definisi, tidak masuk dalam pendataan statistik pariwisata yang diserap dari bahasa Inggris modern di depan sifat penting yang diungkapkan adalah adanya pergerakan wisatawan dari satu tempat ketempat lainnya dan kembali ketempat semula. Dalam definisi tersebut, sifat penting yang terungkap baru mencakup elemen ruang dan belum ada pembatasan terhadap elemen yang terkait dengan waktu atau lamanya orang berpergian, elemen dari tujuan perjalanan seseorang, jarak antara tempat awal wisatawan dan kota tujuan wisata, dan moda transportasi yang digunakan. Sehingga berdasarkan definisi tersebut, untuk membuat basis data statistik kedatangan wisatawan yang sangat berguna untuk mengukur aktivitas wisatawan (semenjak berangkat) dan dampak yang akan ditimbulkan.

2.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mengevaluasi kebijakan pariwisata undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang ada di Kabupaten Samosir dari kebijakan yang mengatur pengelolaan objek wisata yang ada Kabupaten Samosir sebagai salah satu industri pendapatan masyarakat. Kebijakan pariwisata tersebut dapat dilihat dari seberapa jauh keterlibatan masyarakat setempat dalam proses tersebut, bagaimana perkembangan kebijakan tersebut meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengurangi kemiskinan dapat dilakukan melalui pengembangan wilayah maupun pembangunan nasional, meningkatnya pendapatan masyarakat memperluas kesempatan kerja, meningkatkan distribusi hasil pertanian dan komoditi lainnya.

Gambar 1 Skema Kerangka Berpikir Implementasi Kebijakan Publik



Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2022)

Dari bagan kerangka pemikiran di atas dapat di lihat bahwa Implementasi Kebijakan Pengelompokan Dan Pengembangan Objek Wisata Di Kabupaten Samosir dapat di sesuaikan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2019 Tentang Kepariwisataaan Dan Upaya Pengembangan Kabupaten Samosir Pada Pasal 3 Ayat (2) Perda Kab. Samosir No. 7 Thn 2009 Tentang Retribusi Objek Wisata

Dalam menerapkan Kebijakan tidak terlepas dari faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi hasil pengimplementasian kebijakan tersebut. Maka peneliti perlu untuk menganalisis secara ekspilisit apa saja yang menjadi faaktor penghambat dalam pengelompokan dan pengembangan objek wisata di Kabupaten Samosir.

Dan setelah semuanya sudah diketahui, maka penelitti dapat mengetahui bagaimana hasil kebijakan dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam Pengelompokan Dan Pengembangan Objek Wisata Di Kabupaten Samosir.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dasar dalam melakukan penelitian sehingga memperkaya teori-teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini. Penelitian yang sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti dapat ditunjukkan sebagai berikut:

NO	NAMA PENELITI/ TAHUN/ SUMBER	JUDUL	URAIAN	HASIL
1	Erma Tahriana 2019	Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Pengembangan Pariwisata Di Siring Menara Pandang Kota Banjar masin.	Metode Yang Digunakan Adalah Metode Kualitatif Yang Menjadi Informan Penelitian Ini Merupakan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Banjar Masin. Focus Penelitian Mengena Dampak Keberadaan Siring Menara Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Dan Kebijakan Pengelolaan Menggunakan Teori Sugiyono (2016;225) Teknik Pengumpulan Data Berupa Wawancara Dan Dokumentasi	Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan informan bahwa struktur organisasi pada objek wisata Siring Menara Pandang mempunyai pengaruh besar dalam implementasi kebijakan cukup signifikan. Sedangkan untuk struktur menara pandang itu bagian dari pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata jadi sangat berpengaruh. Tentang SOP yang berhubungan dengan mekanisme sistem dan pedoman untuk melaksanakan kebijakan wisata Siring Menara Pandang dilaksanakan mulai dari Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, selanjutnya dilaksanakan juga oleh Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata dan selanjutnya oleh seksi- seksi dan seluruh staf yang ada di lapangan objek wisata siring menara pandang. Faktor penentu yang mempengaruhi implementasi kebijakan diantaranya adalah komunikasi (transmisi, kejelasan, konsistensi) sumber

			<p>Teknis Analisis data yang digunakan terbagi dalam 4 bagian yaitu: reduksi data, pengumpulan data, penyajian data, penarikan kesimpulan yang menjadi lokasi penelitian ini di kota Banjarmasin.</p>	<p>daya (sumberdaya manusia ,anggaran, peralatan, kewenangan), disposisi, dan struktur birokrasi.</p>
2	Ahmawati 2020	<p>Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone</p>	<p>Metode yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif Informan dalam penelitian ini merupakan kepala Dinas pertanian tanaman pangan hortikultural dan perkebunan, Dinas kelautan dan perikanan, Camat kecamatan palakka, kecamatan awing pone, penyuluh, kelompok tani masyarakat Teori yang digunakan peneliti adalah teori van meter dan van horn yang mana implementasi dipengaruhi 6 indikator yaitu: standart dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber daya,</p>	<p>Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa respon positif atau negatif tentang program pengembangan komoditas pada kawasan strategi Kabupaten di Kabupaten Bone yaitu kurangnya komunikasi masyarakat dan pemerintah setempat sehingga masih banyak masyarakat tidak mengetahui adanya program pengembangan komoditas ini, masyarakat perlu tahu mengenai program ini, karena program ini sangat berdampak positif bagi masyarakat itu sendiri, sehingga mampu meningkatkan prekonomian masyarakat di wilayah KSK khususnya komoditas pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, dan masyarakat sangat mengharapkan kepada pemerintah agar memaksimalkan supaya masyarakat lebih gampang mendapatkan informasi terkait dengan pengembangan komoditas unggulan.hubungan komunikasi atau informasi pemerintah dengan masyarakat</p>

			<p>karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait kegiatan pelaksanaan, lingkungan sosial, ekonomi dan politik</p> <p>Fokus Penelitian yaitu kebijakan program komoditas pada kawasan strategi kabupaten di kabupaten bone Teknik</p> <p>Pengumpulan data menggunakan metode trigulasi yang artinya saling mengadakan pengecekan akan keberadaan data yang dikumpulkan melalui trigulasi sumber, metode dan waktu</p> <p>Analisi data dari penelitian ini dengan cara kualitatif dimana peneliti terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data Dari awal hingga akhir. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Palakka, Kecamatan Awangpon, Kecamatan Barebbo</p>	
--	--	--	---	--

3	Sugi Rahayu (2015)	Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourisme) Di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta	Penelitian kualitatif, informan merupakan kepala Dinas pariwisata, wisatawan, pemerintah setempat Fokus Penelitian ini bertujuan untuk menguji upaya yang dilakukan oleh pemerintah kulon progo dalam pengembangan Teknik Pengumpulan data adalah wawancara analisa data menggunakan model inter aktif miles dan huberma Lokasi penelitian kabupaten kulon Progo.	Kabupaten kulon porogo memiliki banyak potensi pariwisata yang dapat dikembangkan menjadi potensial berupa wisata alam (back to wisata nature). Religi wisata religi.
4	Muis 2016	Peran Dinas pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan (studi pengembangan ekowisata di Kabupaten Penajam Paser Utara)	Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek	Hasil dari Penelitian ini merupakan Motivator dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Investor, masyarakat, serta pengusaha dibidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan
5	Nadisa, Maya dan Norken (2010)	Implementasi Program Wisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Marente Kecamatan Alas Kabupaten	Metode yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif Teori yang digunakan adalah teori	Hasil penelitian menunjukkan dari hasil analisis implementasi pengembangan potensi wisata ini memberikan tambahan benefit dalam dua puluh tahun umur investasi. Agar

		Sumbawa Tahun 2020	<p>Edward III Teknik Pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi Teknik Analisis data melalui proses reduction, data display, dan verification. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode berfikirnya menggunakan secara induktif, penelitian ini akan memaparkan tentang suatu penelitaian yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari kedua hal tersebut di tarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Marente Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat</p>	<p>dalam meningkatkan identitasnya sebagai obyek wisata berbasis alam/ ekowisata, maka kelestarian alam dan lingkungan di sekitar objek senantiasa harus dijaga dan diupayakan konservasinya</p>
--	--	--------------------	---	--

Sumber : Data Diolah Oleh Peneliti, (2022)

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan membahas topik yang sama sebagai berikut:

1. Skripsi yang di tulis Oleh Erma Tahriana (2019), dengan Penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Pengembangan Pariwisata di Siring Menara Pandang Kota Banjarmasin”. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan informan bahwa struktur organisasi pada objek wisata Siring Menara Pandang mempunyai pengaruh besar dalam implementasi kebijakan cukup signifikan. Sedangkan untuk struktur menara pandang itu bagian dari pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata jadi sangat berpengaruh. Tentang SOP yang berhubungan dengan mekanisme sistem dan pedoman untuk melaksanakan kebijakan wisata Siring Menara Pandang dilaksanakan mulai dari Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, selanjutnya dilaksanakan juga oleh Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata dan selanjutnya oleh seksi-seksi dan seluruh staf yang ada di lapangan objek wisata siring menara pandang. Faktor penentu yang mempengaruhi implementasi kebijakan diantaranya adalah komunikasi (transmisi, kejelasan, konsistensi), sumber daya (sumber daya manusia, anggaran, peralatan, kewenangan), disposisi, dan struktur birokrasi.
2. Skripsi yang dituli Oleh Ahmawati (2020), dengan penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone”. Hasil Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa respon positif atau negatif tentang program pengembangan komoditas pada kawasan strategi Kabupaten di Kabupaten Bone yaitu kurangnya

komunikasi masyarakat dan pemerintah setempat sehingga masih banyak masyarakat tidak mengetahui adanya program pengembangan komoditas ini, masyarakat perlu tahu mengenai program ini, karena program ini sangat berdampak positif bagi masyarakat itu sendiri, sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah KSK khususnya komoditas pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, dan masyarakat sangat mengharapkan kepada pemerintah agar memaksimalkan supaya masyarakat lebih gampang mendapatkan informasi terkait dengan pengembangan komoditas unggulan. hubungan komunikasi atau informasi pemerintah dengan masyarakat.

3. Skripsi yang ditulis oleh Sugi Rahayu (2015), yang berjudul “Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourisme) Dikabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta” hasil penelitian ini Tata kelola Pengembangan Pariwisata berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) masih sederhana yaitu manual, dengan keterbatasan sumber daya manusia yang profesional bidang pemasaran, reseptionis, reservation, tour guide, akan tetapi accountable, transparan. Jumlah tamu menginap dalam dua tahun sejak dimulai (Juli 2009 - Juli 2011) = 382 Orang, rata - rata tingkat Occupancy = 1,833 % (sangat rendah), rata-rata menginap = 2 malam, jumlah kamar tejual = 208 kamar (masih sedikit) dari total kamar tersedia yaitu 12.000 Manfaat yang didapat Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism) adalah adanya pendapatan /keuntungan ekonomi, pengisi waktu luang, kebersihan dan keamanan lingkungan, timbulnya kreatifitas berbisnis,

pelestarian alam dan budaya

4. Skripsi yang ditulis oleh Muis (2016), yang berjudul “peran Dinas pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan (studi pengembangan ekowisata di Kabupaten Penajam Paser Utara) ” hasil dari Penelitian ini merupakan Motivator dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Investor, masyarakat, serta pengusaha dibidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik.
5. Skripsi yang ditulis oleh Nadiasa, Maya dan Norken (2010) yang berjudul “Implementasi Program Wisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Marente Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Tahun 2020” Hasil penelitian menunjukkan dari hasil analisis pengembangan potensi wisata ini memberikan tambahan benefit dalam dua puluh tahun umur investasi. Agar dalam meningkatkan identitasnya sebagai obyek wisata berbasis alam/ ekowisata, maka kelestarian alam dan lingkungan di sekitar objek senantiasa harus dijaga..

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:02) bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Memperbaiki ketidak seimbangan dengan melakukan penelitian dengan latar belakang yang alamiah, yang menggunakan metode-metode kualitatif, lebih tergantung pada teori dan memperlihatkan upaya penemuan dalam proses penelitian aliran yang ingin memperbaiki digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Creswell (2016:19) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu dan kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur mengumpulkan data yang spesifik, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data.

3.2 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi dan jadwal penilitan nya akan di laksanakan di Kabupaten Samosir Sumatera Utara di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir dengan jalan darat dari kota Medan berjarak 177 km. Dengan waktu jarak tempuh yang umum dilewati berkisar 6 jam. Namun jika lokasi berangkat dari Bandara Silangit Kabupaten Tapanuli Utara dengan jalan darat memakan waktu sekitar 3 jam.

3.3 Informan

Informan merupakan komponen penting yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan peneliti. Informan yang dipilih adalah orang yang benar-benar mengetahui dan terlibat langsung informasi terkait dengan permasalahan penelitian (Sugiono, 2016:300)

Informan inti merupakan para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, tokoh masyarakat maupun akademisi (Sugiyono, 2019: 25)

Informan utama merupakan orang yang mengetahui secara teknis dan detail dengan masalah penelitian yang akan dipelajari (Sugiyono, 2019: 25)

Informan tambahan yaitu siapa saja yang ditemukan di wilayah penelitian yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti (Sugiyono, 2019: 25)

Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi tentang Implimentasi Kebijakan Dan Pengembangan Objek Wisata Di Kabupaten Samosir. Maka informan dalam penelitian ini terdiri dari

1. Informan Kunci, adalah informan yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini yaitu bapak Sugiman, SE selaku kepala bidang Pengembangan di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata di Kabupaten Samosir
2. Informan Utama, yang terlibat langsung dalam berinteraksi sosial yang di teliti. Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini yaitu ibu Shanny Melanova Nainggolan, selaku kepala bidang promosi
3. Informan Tambahan, yang memberikan informasi walupun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang akan di teliti. Adapun yang menjadi informan tambahan dalam penelitian

Tabel 3
Informan Penelitian

NO	URAIAN	JUMLAH (Orang)	KETERANGAN
1	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	1	Informan Kunci
2	Kepala bidang promosi	1	Informan Utama
3	Staf Dinas pariwisata bid. Pengembangan	1	Informan Utama
4	LSM Bidang Pariwisata	1	Informan Pendukung
5	Masyarakat	3	Informan Pendukung
6	Pengunjung	3	Informan Pendukung
TOTAL		10	

Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti, 2022

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan cara untuk menemukan data atau informasi yang akurat dijadikan sebagai bahan penelitian untuk di interpresentasikan oleh peneliti melalui teknik wawancara, oservasi, dokumentasi.

Menurut Sugiyono (2019:194) cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), Dokumentasi, dan gabungan ketiganya.

3.4.1 Observasi

Observasi adalah suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiono 2014 ;145). Teknik pengumpulan data dengan observasi (pengamatan) digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar. Agar dapat mengetahui bagaimana jalannya kebijakan Pemerintah Kabupaten Samosir terhadap program pengelompokan objek wisata di Kabupaten Samosir.

3.4.2 Wawancara

Menurut Pasolong (2013:132): “wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung”. Namun demikian wawancara juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan sarana komunikasi yang ada seperti telepon dan internet. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab atau tatap muka perorangan dengan melakukan pertemuan peneliti dengan informan. Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri.

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada informan, untuk memenuhi penelitian. Peneliti

juga akan menggunakan alat bantu rekaman suara dan G-form untuk melakukan sesi wawancara. Wawancara yang dilakukan peneliti dengan melakukan pendekatan kepada orang yang bersangkutan dan dapat mengenal lebih dalam karakter dari seseorang tersebut. Hasil wawancara ini nantinya akan menjelaskan bagaimana implementasi dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Samosir dalam mengelompokkan sektor pariwisata yang dibuat selamaini dalam pengelolaan objek wisata di Kabupaten Samosir.

3.4.3 Dokumentasi

Sugiono (2010) mengatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang. Dokumen berbentuk tulisan dapat berupa sejarah, peraturan-peraturan atau kebijakan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Lebih lanjut Sugiyono menjelaskan bahwa hasil data observasi dan wawancara akan lebih kredibel/ dapat dipercaya kalau didukung oleh bukti dokumen seperti sejarah atau profil, peraturan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data empiris, maka pengumpulan data pun bergerak dari lapangan empiris untuk memperoleh data dan teori dalam program pengelompokan sector objek wisata

3.5 Teknik Analisa Data

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara seperti: Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan sebagainya. Data yang di kumpulkan adalah Implementasi kebijakan

pemerintah Kabupaten Samosir dalam program pengelompokan sektor pariwisata yang bertujuan untuk membangun Sektor Pariwisata guna meningkatkan perekonomian Masyarakat Kabupaten Samosir.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, proses ini berlangsung terus menerus. Reduksi data meliputi: meringkas data, Peneliti akan mengelola info Masyarakat. Dari hasil pemilihan informan tersebut maka peneliti akan menggolongkan informan mana yang perlu dan tidak perlu.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yaitu sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi yang mengarah pada analisa tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman. Alasan dasar dilakukan pada tahap ini adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang disederhanakan dan mudah dipahami. Dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Samosir dalam program pengelompokan sektor pariwisata di Kabupaten Samosir

4. Kesimpulan data (*Conclusion Drawing/ Verivication*)

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep dasar penelitian. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian tersebut lebih tepat dan objektif. Alasan dasar dilakukannya pada tahap ini adalah

menyederhanakan informasi yang kompleks kedalam suatu bentuk yang di sederhanakan dan mudah dipahami.

3.6 Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis Triangulasi dipilih sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepercayaan (kreadibilitas) sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Analisis Triangulasi sama dengan menganalisis jawaban dari informan dengan cara meneliti kebenarannya menggunakan data empiris (sumber data lainnya) yang tersedia. Disini, jawaban subjek akan cross – check dengan dokumen atau bahan referensi yang sudah ada (Kriyantono, 2014).

Tabel 4 Penyelesaian Skripsi

No	Rangkaian kegiatn	2022				2023									
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Penyusunan Proposal														
2	Seminar proposal														
3	Pengumpulan data survei														
4	Pengumpulan data														
5	Seminar hasil														
6	Penyelesaian bimbingan skripsi														
7	Sidang meja hijau														

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan mulai dari pengumpulan data, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa,

1. Implementasi kebijakan Dalam pengelompokan dan pengembangan objek wisata di Kabupaten Samosir melalui Dinas Pariwisata, Pemerintah Melakukan upaya pengembangan pariwisata dengan berbasis RIPO (Rencana Induk Pengembangan objek wisata) dengan melakukan pengelompokan ke 3 klasifikasi objek wisata yaitu Prioritas, Unggulan, dan Rintisan klasifikasi ini dilakukan untuk mempermudah Dinas pariwisata melakukan pengembangan dengan cara melakukan penataan pada lokasi objek wisata yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke objek wisata yang ada di Kabupaten Samosir.
2. Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam upaya pengembangan objek-objek wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir adalah permasalahan kepemilikan lahan pada objek wisata sehingga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kesulitan dalam melaksanakan pengembangan terhadap Objek Wisata. Rendahnya kesadaran Masyarakat terhadap pengembangan

Pariwisata, Masyarakat kurang tidak menyadari bahwa pariwisata dapat menjadi sumber perekonomian. Sarana dan prasarana pendukung dalam mengimplementasikan kebijakan dalam pengembangan objek wisata Kabupaten Samosir yang tergolong masih kurang perhatian dari Pemerintah dan masih kurang memadai seperti penyediaan transportasi untuk menuju objek-objek wisata, masih kurang memberikan pelatihan kepada pemandu-pemandu wisata yang ada di Kabupaten Samosir

5.2 Saran

Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir disarankan untuk :

1. Harapan agar pemerintah, masyarakat, dan pelaku wisata swasta agar berkolaborasi dalam pembangunan pariwisata demi kemajuan Kabupaten Samosir. Pemkab agar banyak melakukan pembinaan dan pendekatan kepada masyarakat seperti contoh mensosialisasikan bagaimana pelayanan yang baik kepada wisatawan (pengunjung), melakukan kegiatan bimtek, bagaimana cara menjaga lingkungan, harus ada ketegasan dari pemerintah kepada masyarakat yang merusak fasilitas pada objek-objek wisata dan terkait harga jual kuliner dan souvenir.
2. Sumber Daya Manusia dalam mengembangkan potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Samosir agar masyarakat lebih Kreatif dan bijak memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk membantu tingkat perekonomian

DAFTAR PUSTAKA

Butler, R.W. 1980. *The Concept of Tourism Area Cycle of Evolution: Implications for the Management of resources. The Canadian Geographer*. DIA: *Jurnal Administrasi Publik*, Desember 2019, Vol. 17, No. 2e-ISSN2615-7268

Indonesia, *Seni Pertunjukan, et al. Pariwisata*. Bandung: Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia (MSPI), 1999.

Irawan, M. E. (2015). *Implementasi kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010

Mulyana, Bedi. 2011. *Pengembangan Kota Bogor sebagai Destinasi Pariwisata Internasional*. *Jurnal Ilmiah Pariwisata* Vol. 2, No. 1, September 2012

Ratman, Dadang Rizki. 2016. *Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas 2016- 2019. Disampaikan pada rapat koorDinasi nasional Kementerian Pariwisata Republik Indonesia; Akselerasi Pembangunan Kepariwisataaan Dalam Rangka Pencapaian Target 12 Juta Wisatawan Mancanegara dan 260 juta Wisatawan Nusantara Tahun 2016 pada tanggal 27 Januari 2016 di Jakarta*

Ridwan, M. (2021). *Pengembangan Produk Pariwisata Dalam Mewujudkan Branding Pariwisata Kabupaten Samosir*. LOSARI: *Jurnal Arsitektur Kota dan Pemukiman*, 15-21.

Saputra, A., & Ali, K. (2020). *Analisis Kebijakan Pariwisata Terhadap Pengelolaan Objek Wisata Di Kabupaten Samosir*. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 564-584.

Sidauruk, J. (2015). *Implementasi Program Pengembangan Pariwisata Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi PadaDinas Pariwisata Seni Dan Budaya Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara)* (Doctoral Dissertation, Universitas Brawijaya).

Simaringga, (2022) *Evaluasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Dalam Pengelolaan Objek Wisata Di Pantai Lumban Bulbul Balige Kabupaten Toba.*

Sogiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Bambang Sunggono Browne and Wildavsky. (2004). (Dalam Nurdin Dan Usman, 2004:70)

Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy.* Washington DC; Congressional Quarterly Press.

Joko Pramono. S.sos., M.Si. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik.* Surakarta. UNISRI Press.

Pitana, I. (2005). *Sosiologi pariwisata.* (1994). *Hukum Dan Kebijaksanaan Publik*; <https://bpiw.pu.go.id/article/detail/upayakan-percepatan-pengembangan-pariwisata-pemkab-samosir-koordinasi-dengan-bpiw>

<https://samosirkab.go.id/potensi-unggulan-kabupaten-samosir-pariwisata/>

<https://tobasamosirkab.bps.go.id/subject/16/pariwisata.html>

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Undang-undang republic Indonesia nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan

Keputusan Presiden No 22 Tahun 2011 tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia

Peraturan Menteri Pariwisata No.14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata

Permen Pariwisata No 104 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Kebudayaan dan Pariwisata di Daerah

Permen Pariwisata No 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Danau Toba

Permen Pariwisata No 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

Permen Pariwisata No 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Permen Pariwisata No 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Kerjasama di Lingkungan Kementerian Pariwisata

Permen Pariwisata No 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata di BKPM

Permen Pariwisata No 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Kementerian Pariwisata



LAMPIRAN

PEDOMAN OBSERVASI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOMPOKAN OBJEK
WISATA DAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA
DI KABUPATEN SAMOSIR**

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut :

1. Lokasi
Lokasi penelitian di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir
2. Fasilitas, sarana dan prasarana
Fasilitas , sarana dan prasarana di kantor Dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Samosir Tempat parkir, Ruang tunggu ,Toilet Umum, Aula penediaan papan informasi
3. Pelaksanaan Pelayanan
Pelaksanaan kegiatan/ program di Kantor Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Samosir
4. Sikap Petugas
Respon/ Sikap pegawai di Kantor Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Samosir ramah dan santun serta membantu dan mencari data apa yang peneliti perlukan.

Instansi : Dinas kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Samosir
 Nama Program : Pengelompokan Dan Pengembangan Obejek Wisatadi Kabupaten Samosir
 Lokasi : Parbaba Dolok, Kec Panguaruran, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara
 Tanggal : 16 Januari 2023

No	Yang Diamati	Ya	Tidak	Bukti / Indikator
1	Stuktur Organisasi-Topoksi	V		Dilihat penelitian langsung Dilokasi
2	Sikap pegawai	V		Membantu memberikan data yang peliti perlukan
3	Website Instansi	V		
4	Sosial Media Instansi	V		Instagram, facebook, youtube
5	Sarana dan prasarana a. Parkir b. ruang tunggu c. Ruang keraja d. Toilet e. Bus pariwisata	V		Di lihat penelitian langsung di lokasi

LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOMPOKAN OBJEK
WISATA DAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA
DI KABUPATEN SAMOSIR**

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Samosir

Dalam usulan penelitian ini peneliti hanya mengemukakan rencana wawancara secara garis besar yang akan dikembangkan secara lebih mendalam pada saat wawancara dilakukan terhadap informan sehingga diharapkan perolehan informasi yang lengkap, aktual dan akurat.

A. Tujuan :

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Samosir

B. Pertanyaan panduan

a. Identitas Diri

- 1) Nama : Sugiman Simatupang SE
- 2) Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan
- 3) Agama : Kristen
- 4) Jenis kelamin : Laki-laki
- 5) Pendidikan terakhir : S1

b. Pertanyaan penelitian

- 1) Bagaimana upaya Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir dalam pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Samosir dari dulu sampai sekarang?

“jadi kebijakan pemerintah melalui Dinas kebudayaan dan pariwisata tentang pengembangan objek wisata kita yang berbasis RIPO jadi disinilah klasifikasikan objek wisata yaitu prioritas, unggulan, rintisan jadi dari data rincian objek wisata ada sekitar 150 lebih objek wisata yang ada di Kabupaten Samosir dengan pengelompokan wisata yang 3 tadi ada unggulan, prioritas, Rintisan ini lah basis untuk kita melakukan pengembangan, kenapa disebut wisata unggulan tentu berdasarkan seberapa bagus penataan lokasi objek wisatanya, seberapa lengkap fasilitasnya, bagaimana aksesibilitasnya kemudian bagaimana kunjungan wisatawan yang mempengaruhi objek wisata itu mau klasifikasi wisata unggulan adalah dari segi kunjungan wisatawan nya kalau sudah banyak di kunjungi wisatawan maka itu menjadi salah satu nilai untuk menentukan dia diklasifikasi mana. Nah... berdasarkan ini lah kita melakukan pengembangan. Mulai dari situ kita mulai melakukan pengembangan dengan cara melakukan penataan sehingga dapat mengundang wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal, karna yang kitaharapkan apabila kunjungan itu bertambah tentu akan berpengaruh pada pendapatan daerah. dari klasifikasi ini lah dasar pengembangan untuk mengajukan pembangunan fisik dan pemenuhan fasilitas ke pemerintah pusat maupun provinsi basis data kita dari klasifikasi ini lah. Pengembangan bisa dilakukan Melalui dana daerah, dana provinsi, APBD, dan APBN dari kementerian pariwisata

seperti itulah konsepnya”

- 2) Kebijakan apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengembangan objek wisata di Kabupaten Samosir?

“Dari 150 RIPO klasifikasi pengembangan objek wisata kami mengajak masyarakat untuk membentuk POKDARWIS kelompok sadar wisata selain POKDARWIS kami juga mengajak komunitas dalam bentuk apapun dari kelompok masyarakat.

- 3) Bagaimana kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir untuk membangkitkan partisipasi masyarakat dalam memberdayakan objek- objek wisata yang ada di Kabupaen Samosir?

“kita ajak mereka untuk berpartisipasi, karna memang ketika mereka menyadari bahwa berkembang nya sektor wisata tersebut berdampak bagi perekonomian masyakat maka kami yakin mereka akan bergerak sendiri untuk menata dan memberikan yang terbaik dilingkungan dengan cara menyediakan aminitas (penginapan), kerajinan tangan, kulinerdi objek wisata sehingga apabila pengunjung semakin ramai berdatangan akan berdampak positif bagi perekonimannya”

- 4) Adakah hubungan kerjasama antara Dinas Pariwisata dengan Masyarakat atau Lembaga-Lembaga lain dalam pengembangan Objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Samosir?

“ Pemerintah Kabupaten Samosir sudah menetapkan 54 Desa Wisata, Desa Wisata ini adalah salah satu konsep pembangunan pariwisata dengan seluruh potensi yang ada di Desa dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam, jadi dengan adanya Desa wisata kami mengharapkan keterlibatan Pemerintah Desa mengembangkan Desa tersebut.

- 5) Bagaimana pengelolaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana objek wisata yang ada Di Kabupaten Samosir dengan melibatkan Masyarakat Kabupaten Samosir?

“kita mengajak masyarakat yang ada di sekitar objek wisata apalagi yang mempunyai anak-anak untuk menjaga aminita (sarana dan prasaran) di objek wisata kita mengajak masyarakat sekitar menjaga keamanannya, menjaga kebersihannya. Terkait pemeliharaan sarana dan prasana semisal ada yang rusak, ada yang perlu di perbaiki itu menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di seluruh objek yang dikelola oleh Pemerintah, tetapi jika Objek itu di kelola Oleh Pihak Swasta maka itu tanggung jawab Swasta itu sendiri. Menjaga keamanan itu memang sangat penting kita ajak mereka supaya ini jangan di rusak contohnya juga seperti ke Anak-anak agar tidak merusak , lampu Tamannya, Tanaman yang yang ada di objek wisata maupun sekitarnya jangan sampai ada yang di rusak kalaupun ada sampah berserak di kutip dan langsung di buang begitu”

- 6) Apakah Tempat parkir yang ada di objek wisata daerah Kabupaten Samosir merupakan atas kesadaran masyarakat atau atas organisir Dinas Pariwisata, lalu bagaimana dengan jaminan keamanan pada kendaraan pengunjung?
- “ Terakit lahan parkir di seluruh objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Samosir yang di kelola oleh pemerintah ada lahan parkirnya tapi yang di kelola oleh Swasta kami juga mengajak untuk menyiapkan parkirnya dan mereka itu sudah siapkan masing-masing. Lalu mengenai keamanan parkir jika itu di sepanjang kawasan objek wisata yang di kelola Pemerintah selama masih berada di jam kerja kita akan mengamankan, menjaga kendaraan yang ada dilokasi objek wisata karna kita sudah menyediakan petugas parkir dan keamanan di objek wisata yang dikelola pemerintah kalau objek wisatanya di kelola oleh pihak Swasta maka itu menjadi tanggung jawab pengelola itu sendiri dan jika kendaraan hilang dilokasi objek wisata yang di kelola Pemerintah maka kami bertanggung jawab penuh untuk mengamankan.

Bidang promosi Dinas kebudayaan dan pariwisata Kab.Samosir

a. Identitas Diri

- 1) Nama : Shanny Melanova Nainggolan, S.Sos
- 2) Jabatan : Kepala Bidang Promosi
- 3) Agama : Kristen Protestan
- 4) Jenis kelamin : Perempuan
- 5) Pendidikan terakhir : S1

b. Pertanyaan peneliti

1) Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan tugas dan fungsi bidang promosi dalam mengembangkan pariwisata Kabupaten Samosir?

Jawab: Menjadi faktor pendukung promosi pengembangan pariwisata adalah Tentu saja panorama keindahan Danau Toba menjadi andalan utamanya untuk menarik kunjungan wisatawan. Kabupaten Samosir terletak di tengah-tengah Danau Toba. Saat ini salah satu destinasi wisata yang dipromosikan pemerintah Indonesia adalah Kabupaten Samosir dan sekitarnya yang menawarkan keindahan panorama Danau Toba dan Tradisi budaya lokal penduduk setempat.

Menjadi faktor penghambat promosi pengembangan pariwisata adalah Terbatasnya anggaran dan SDM profesional dalam mempromosikan pengembangan pariwisata misalnya dalam hal penguatan promosi melalui media elektronik, pameran dalam dan luar negeri dan pelaksanaan event

yang menjadi salah satu daya tarik wisatawan lama tinggal berlibur di Samosir.

2) Apa manfaat promosi bagi pembagunan pariwisata di Kabupaten Samosir?

Jawab: Promosi pariwisata bukan hanya bertujuan mengenalkan satu destinasi wisata, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kepada wisatawan tentang nilai penting destinasi di Samosir. Promosi pariwisata menjadi salah satu kunci penting untuk keberhasilan upaya meningkatkan angka kunjungan turis di suatu objek wisata. Melalui promosi maka wisatawan akan mengetahui bahwa ada lokasi yang menarik untuk disinggahi. Promosi wisata memberikan informasi kepada publik bahwa ada pemandangan alam yang indah, ada budaya lokal yang memiliki keunikan, dan ada kuliner-kuliner lezat yang siap memanjakan lidah. Dengan promosi yang optimal, semua potensi yang dimiliki suatu tempat tujuan wisata dapat diketahui masyarakat luas dan dapat menggenjot pembangunan sektor pariwisata di suatu daerah.

3) Apa saja program yang sudah di susun oleh bidang promosi dalam meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan kunjungan wisatawan internasional ke Kabupaten Samosir?

“ Sebagai daerah yang masuk ke dalam program Destinasi Super Prioritas, Kabupaten Samosir dituntut untuk mengembangkan sektor pariwisatanya dengan tujuan meningkatkan angka kunjungan wisatawan.

Promosi pariwisata berbasis event menjadi fokus utama yang dilakukan

pemerintah kabupaten untuk mengembangkan pariwisata Samosir. Pada saat ini, ada beragam aplikasi media sosial yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat promosi pariwisata. Misalkan saja, website, twitter, instagram, facebook, youtube, line, path, dan berbagai aplikasi media sosial lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah hingga pengelola objek wisata.

4) Apakah program yang dibuat sudah terrealisasi dengan baik?

“ Program realisasi event saat ini masih kurang, dimana event yang dilaksanakan Pemerintah Daerah tidak lagi sebanyak sebelum pandemi covid-19. Dulu dikenal dengan Horas Samosir Fiesta yang pelaksanaan event nya ada setiap bulan dalam setiap tahunnya yang menjadi kalender event tahunan di Samosir. Saat ini tahun 2023 event Pemerintah Daerah hanya Pekan Kebudayaan Daerah dan Samosir Music International, sehingga pendukung event dari Komunitas dan masyarakat menjadi tolak salah satu sarana menambah daya tarik wisatawan.

5) Apa saja sarana promosi yang di gunakan dalam pengelompokan dan pengembangan pariwisata Kab Samosir?

Jawab: Sarana promosi berupa media cetak, media elektronik, media social dan media ruang. Media cetak dapat kita gunakan sebagai bahan informasi di objek wisata, media elektronik dapat kita gunakan sebagai

bahan informasi dalam elektronik, media social sebagai sarana informasi agar lebih luas dan media ruang dalam bentuk Tourist Information Centre (TIC) di Tuktuk Siadong, Pangururan dan Bandara Silangit.

6) Bagaimana wisatawan domestic dan wisatawan internasional mengetahui bahwa Kabupaten Samosir mempunyai banyak potensi wisata?

“Perkembangan pertumbuhan ekonomi Samosir sendiri dapat dilihat masih sedikitnya potensi yang dieksplor dan dijadikan kegiatan yang bersifat ekonomis di Samosir. Salah satu faktor yang menentukan meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah yakni semakin baiknya sektor pendidikan yang didukung dengan kesehatan dan fasilitas-fasilitas lainnya yang dilihat dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM). Dengan adanya peningkatan IPM diharapkan mampu mendorong minat wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk datang berkunjung ke Samosir. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah wisman dan wisnus yang datang berkunjung setiap tahunnya ke Samosir walaupun masih didominasi oleh wisnus, masih banyak peluang bagi Samosir untuk menjadi destinasi wisata menarik di Sumatera dan khususnya Indonesia dan di mata dunia internasional”.

Wawancara HPI Kabupaten Samosir

a. Identitas Diri

- 1) Nama : Delima Rumahorbo
- 2) Agama : Kristen
- 3) Jabatan : Bendahara Hpi
- 4) Jenis Kelamin : Perempuan
- 5) Pendidikan Terakhir : S-1

b. Pertanyaan peneliti

- 1) apa yang menjadi faktor penghambat dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pemandu wisata?

“ Tidak semua anggota yang terdata aktif dalam kegiatan HPI DPC Samosir. Ketua yang sekarang bukan ketua terpilih pada saat MusCab September 2022. Ketua tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya sehingga ide ide / program dari anggota belum ada yang berjalan sampai saat ini 31 Mei 2023. Tidak semua anggota melakukan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing- masing karena tidak ada intruksi tegas dari kedua “.

- 2) Apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan sebagai pemandu wisata?

“ Yang menjadi **Kekuatan** : Saat ini Danau Toba menjadi 5 Destinasi Super Prioritas Indonesia, Jadi promosi-promosi wisata banyak wisatawan semakin banyak baik domestic maupun mancanegara. Danau

Toba memiliki banyak hal yang menarik yang bisa disajikan kepada wisatawan. Bentang alam yang sangat indah dari berbagai sudut. Budaya dari beberapa suku di seputaran Danau Toba yang unik dan menarik.

secara *Ilmiah* : Hasil penelitian para Geosaintis terjadinya Danau Toba dan pulau pulau di Danau Toba yang menarik. Kita memiliki data yang dibelikan langsung oleh geosaintis dan uniknya Danau Toba untuk dibagikan pada saat melakukan kependamuan. Lokasi- lokasi wisata di Samosir juga memiliki banyak cerita rakyat yang tidak kalah menarik.

“ Dan yang menjadi **Kelemahan** : Pemandu Wisata anggota HPI DPC Samosir bahasa asing aktif hanya Bahasa Inggris, bahasa asing pasif bahasa Belanda, Jerman, Mandarin. Belum bisa berkomunikasi aktif dalam beberapa bahasa asing. Dan tidak semua tour guide yang tergabung di HPI DPC Samosir bisa berkomunikasi dengan Bahasa Inggris “

3) Adakah bentuk kerjasama antara Dinas pariwisata dengan HPI?

“ ada..... Contohnya Mengundang anggota HPI DPC Samosir dalam peningkatan SDM seperti pelatihan-pelatihan tentang kepariwisataan. Membantu sertifikasi anggota HPI DPC Samosir Tapi anggota HPI DPC Samosir masih membutuhkan pelatihan peningkatan SDM , pelatihan, karena saat ini masih bergilir ikut pelatihan. Harapan besar kami, HPI DPC Samosir dilibatkan dalam kegiatan – kegiatan yang diadakan

pemerintah sehingga kami menambah pengalaman dan wawasan “.

Pelaku usaha/ pengelola tempat wisata

a. Identitas diri

- 1) Nama : Rohani Silalahi
- 2) Agama : Kristen
- 3) Jenis kelamin : Perempuan
- 4) Pekerjaan : Pengerajin Tenun
- 5) Pendidikan Terakhir : SMK

b. Pertanyaan peneliti

- 1) Apakah selama ini Dinas Pariwisata pernah melakukan pelatihan atau pembinaan kepada para pengrajin tenun ulos di kampung ulos?
“ pemerintah juga turut serta melakukan pembinaan seperti 2 kali setahun”
- 2) Apakah pemerintah ikut berpartisipasi dalam menyediakan/memberi sumbangan alat-alat tenun ulos yang ada di kampung ulos di Kabupaten Samosir?
“ Untuk partisipasi dari pemerintah baik ada sumbangan juga tapi itu lah alat-alat yang di kasih dari pemerintah kualitasnya kurang bagus kayak semacam asal ada”

Pelaku wisata/wisatawan

a. Identitas diri

- 1) Nama : Azizah
- 2) Agama : Islam
- 3) Jenis kelamin : Perempuan
- 4) Pekerjaan : Wirausaha
- 5) Alamat : Bandung
- 6) Pendidikan terakhir : SMA

b. Pertanyaan peneliti

- 1) Bagaimana kebersihan pada objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Samosir?
“ Kebersihan Objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Samosir ini sudah sangat lumayan ”
- 2) Apakah Sarana dan Prasarana sudah memadai sehingga pengunjung mendapat kemudahan dan kenyamanan saat melakukan kunjungan wisata?

“ sejauh yang saya lihat dan rasakan masih ada beberapa tempat objek wisata untuk toiletnya masih belum di perhatikan segi kebersihan toilet umumnya juga kurang kadang banyak toilet yang kami jumpai di sekitar objek wisata pada rusak, ada yang tidak menyediakan air di toilet seprtu itu”

- 3) Bagaimana menurut anda pelayanan Masyarakat Kabupaten Samosir yang diberikan kepada wisatawan ?

“ Menurut saya pribadi sudah mulai membaik dari sebelumnya tetapi yang meresahkan menurut saya mungkin untuk wisatawan lain yang datang dari luar sana juga pemberian harga jual pada makan luar biasa sampai detik ini saya pernah melakukan kunjungan wisata ke pulau Jawa sana, saya juga paham untuk pajak memang terbilang cukup mahal tapi jangan untuk harga jual di Samosir ini perbandingannya sampai 50% ya paling tidak kan ambil keuntungannya 10 atau 20% saja, nah kan kalau penjual makanan dan minuman teralalu mengambil keuntungan yang terlalu banyak bisa-bisa yang dari kalangan menengah ke bawah takut untuk berbelanja ”

- 4) Mengapa anda tertarik untuk berlibur ke Kabupaten Samosir?
“karna saya sangat takjub dan merasa tenang ketika berkunjung ke Kabupaten Samosir tidak hanya satu objek wisata yang bisa kami nikmati , dari setiap tempat yang saya kunjungi memiliki daya tariknya masing-masing.

Lampiran

Dokumentasi

Penelitian



Dokumentasi peneliti saat wawancara dengan informan kunci yaitu bapak sugiman simatupang, SE selaku kepala bidang pengembangan destinasi pariwisata.



Dokumentasi penelitian saat wawancara dengan informan utama yaitu ibu Shanny Melanova Nainggolan, S.Sos selaku kepala bidang promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata





Dokumentasi daftar data wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Samosir yang diperoleh peneliti dari Dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Samosir di ruangan sekretaris.



Dokumentasi salah satu halte di kecamatan simanindo tepatnya di pintu masuk pantai situngkir yang menjadi salah satu bentuk pengembangan objek wisata di Kabupaten Samosir.



Dokumentasi saat wawancara dengan salah satu wisatawan lokal di objek

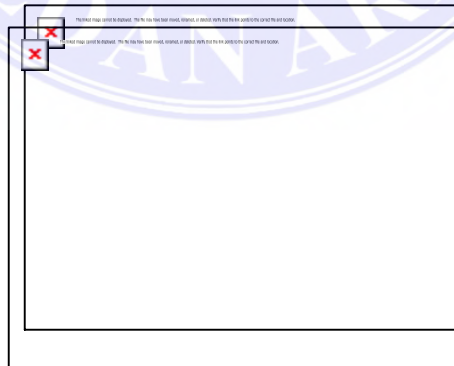
wisata sibe-bea Kabupaten Samosir.



Dokumentasi saat wawancara dengan salah satu wisatawan mancanegara yang menjadi informan pendukung di daerah kecamatan simanindo.



Dokumentasi salah satu LSM di Kabupaten Samosir yaitu kampung ulos hutaraja di desa lumban suhi-suhi toruan.



Dokumentasi saat wawancara dengan salah satu peserta LSM kampung ulos hutaraja yang sedang beraktivitas menenun ulos.

Dokumentasi saat wawancara dengan staf bidang pengembangan destinasi pariwisata Dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Samosir.



Dokumentasi salah satu bentuk promosi pariwisata Kabupaten Samosir yang diusulkan oleh bidang promosi Dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Samosir.



Dokumentasi salah satu puskesmas yang berada tidak jauh dari pantai tandarabun yang merupakan bentuk pengembangan destinasi pariwisata.



Dokumentasi wawancara dengan anggota HPI yang berlokasi di tuktuk

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP SINGKAT

Nama : Tiur Dame Regina Sagala

Tempat, Tgl Lahir : Harianboho, 07 September 1999

Agama : Katolik

Pekerjaan : Mahasiswa

Pendidikan Formal

2019 – Sekarang : Program studi Ilmu Pemerintahan, Fisipol UMA

2018 – 2019 : Smart Fast Global Education Pekanbaru, Administrasi

2015 – 2018 : SMK Negeri 2 Balige

2012 – 2015 : SMP Negeri 1 Harianboho

2006 – 2012 : SD Negeri 2 Harianboho

Alamat Rumah : Jl. William Iskandar No.135, Kec. Sidorejo Kab. Medan Tembung

e-mail : sagalaboru02@gmail.com

No. Hp : 082180341178